

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWODADI TAHUN 2024- 2044

LAMPIRAN IV
TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (TABEL INDIKASI PROGRAM)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																												
1.	PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN																												
1.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.1																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.1																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
1.2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																												
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	a. SWP I.B Blok I.B.1; dan b. SWP I.C Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	a. SWP I.B Blok I.B.1; dan b. SWP I.C Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V								
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
																															umum dan penataan ruang)
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan																														
1.3.1	Pusat Lingkungan Kecamatan																														
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
1.3.2	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa																														
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	a. SWP I.A Blok I.A.2; b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan e. SWP 1.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	a. SWP I.A Blok I.A.2; b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan e. SWP 1.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
2.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI																														
2.1	Jalan Kolektor Primer																														
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer menjadi Jalan Nasional Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																												<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																											undangan	bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pembangunan Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																												peraturan perundang-undangan	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA							
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5	1	2	3	4	5	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																							<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																							<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pembangunan Prasarana Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																							<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Pembangunan Prasarana Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																							<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Pembangunan Prasarana Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																							<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Pembangunan Prasarana Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																							<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Pembangunan Prasarana Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V							
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus	SWP I.D																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kolektor Klambu – Godong – Purwodadi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C																											<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kolektor Kalongan - Kandangan	SWP 1.E																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kolektor Lingkar Utara Purwodadi	SWP I.C dan SWP I.D																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kolektor Purwodadi – Klambu/BTS. Kab	SWP I.D																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
	Kudus																									peraturan perundang-undangan	urusan pemerintahan bidang perhubungan)		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kolektor Purwodadi – Wirosari	SWP I.D																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) 		
2.2	Jalan Kolektor Sekunder																												
	Rehabilitasi Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; b. Jalan Brigjend. Katamso yang melalui SWP I.A; c. Jalan Brigjend. Sudiarto yang melalui SWP I.B dan SWP 1.E; d. Jalan MT. Haryono yang melalui SWP I.A; e. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A dan SWP I.D; dan g. Jalan Untung Suropati yang melalui SWP I.A dan SWP I.C. 																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 		
	Rekonstruksi Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; b. Jalan Brigjend. Katamso yang melalui SWP I.A; c. Jalan Brigjend. Sudiarto yang melalui SWP I.B dan SWP 1.E; d. Jalan MT. Haryono yang melalui SWP I.A; e. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A dan SWP I.D; dan g. Jalan Untung Suropati yang melalui SWP I.A dan SWP I.C. 																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 		
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; b. Jalan Brigjend. Katamso yang melalui SWP I.A; c. Jalan Brigjend. Sudiarto yang melalui SWP I.B dan SWP 1.E; 																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
		SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; j. Karang Sari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C; p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																											
	Rekonstruksi Jalan Lokal Primer	a. Brati – Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP 1.E; c. Danyang - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E;																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
		j. Karangsari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C; p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																							
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer	a. Brati – Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP 1.E; c. Danyang - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; j. Karangsari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui																					<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V								
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044								
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5		
		m. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; n. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan o. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																									
	Pembangunan Prasarana Jalan Lokal Primer	a. Brati – Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP 1.E; c. Danyang - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; j. Karang Sari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C; p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Lokal Primer	a. Brati – Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP 1.E; c. Danyang - Krangganharjo yang																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
		melalui SWP I.B; d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; j. Karang Sari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C; p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																											
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer	a. Brati - Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP 1.E; c. Danyang - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A;																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
		i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; j. Karang Sari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C; p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																											
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lokal Primer	a. Brati - Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP 1.E; c. Danyang - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B; e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B; f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan; g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; j. Karang Sari - Menduran yang melalui SWP I.D; k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C; l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D; m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP 1.E; n. Ngurangan-Majenang yang melalui																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
		SWP I.C; o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C; p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP 1.E; dan q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.																											
2.4	Jalan Lokal Sekunder																												
	Rehabilitasi Jalan Lokal Sekunder	a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP 1.E; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C; d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Glugu melalui SWP I.E; g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; h. Jalan Kapt. Rusdiyot yang melalui SWP I.B; i. Jalan Kapt. Tendean yang melalui SWP I.A; j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A; k. Jalan KH Hasan Anwar yang melalui SWP I.C; l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A; m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A; n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C; o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A; p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A; s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A;																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
		t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A x. Jalan Soponyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Soponyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Soponyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.																							
	Rekonstruksi Jalan Lokal Sekunder	a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP I.E; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C; d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Glugu melalui SWP I.E; g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; h. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B;																				<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
		i. Jalan Kapt. Tendean yang melalui SWP I.A; j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A; k. Jalan KH Hasan Anwar yang melalui SWP I.C; l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A; m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A; n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C; o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A; p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A; s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A; t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A; x. Jalan Sopyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Sopyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Sopyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirta yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui																							

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
		SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.																											
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Sekunder	a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP I.E; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C; d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Glugu melalui SWP I.E; g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; h. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B; i. Jalan Kapt. Tendean yang melalui SWP I.A; j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A; k. Jalan KH Hasan Anwar yang melalui SWP I.C; l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A; m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A; n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C; o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A; p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A; s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A; t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A;																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
		u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A x. Jalan Soponyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Soponyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Soponyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.																							
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Lokal Sekunder	a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP I.E; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C; d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Glugu melalui SWP I.E; g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; h. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B; i. Jalan Kapt. Tendeian yang melalui SWP I.A;																					<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
		j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A; k. Jalan KH Hasan Anwar yang melalui SWP I.C; l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A; m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A; n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C; o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A; p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A; s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A; t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A; x. Jalan Sopyonyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Sopyonyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Sopyonyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui																											

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
		v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A x. Jalan Soponyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Soponyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Soponyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirta yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.																							
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Lokal Sekunder	a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP I.E; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C; d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Glugu melalui SWP I.E; g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; h. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B; i. Jalan Kapt. Tendean yang melalui SWP I.A; j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A;																					<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
		k. Jalan KH Hasan Anwar yang melalui SWP I.C; l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A; m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A; n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C; o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A; p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A; s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A; t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A; x. Jalan Sopyonyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Sopyonyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Sopyonyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya																							

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V							
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044							
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5	
		w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A x. Jalan Soponyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Soponyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Soponyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.																								
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lokal Sekunder	a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP I.E; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C; d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A; f. Jalan Glugu melalui SWP I.E; g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; h. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B; i. Jalan Kapt. Tendean yang melalui SWP I.A; j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A; k. Jalan KH Hasan Anwar yang melalui SWP I.C;																							<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
		l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A; m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A; n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C; o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A; p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A; s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A; t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A; w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A; x. Jalan Soponyono I yang melalui SWP I.A; y. Jalan Soponyono II yang melalui SWP I.A; z. Jalan Soponyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A; bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A; dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan; ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A; ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B; gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan hh. Jalan lokal sekunder lainnya lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.																											

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA									
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V								
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044								
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
2.5	Jalan Lingkungan Primer																											
	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Rekonstruksi Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
																											peraturan perundang-undangan	dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
2.6	Jalan Lingkungan Sekunder																												
	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Rekonstruksi Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																												undangan	permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
2.7	Terminal Penumpang Tipe B																												
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Tipe B Purwodadi berada di SWP I.C Blok I.C.1.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
2.8	Terminal Barang																												
	Pembangunan Terminal Barang	Sub Terminal Agrobisnis (STA) berada di SWP I.B Blok I.B.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian (Kementerian yang berwenang dalam urusan perdagangan) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan perdagangan)
	Fasilitasi Pengelolaan Terminal Barang	Sub Terminal Agrobisnis (STA) berada di SWP I.B Blok I.B.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian (Kementerian yang berwenang dalam urusan perdagangan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA									
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V								
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044								
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																											peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan perdagangan)
2.9	Lain-Lain																											
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)
	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyediaan Infrastruktur Jaringan Jalur Kereta Api	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Stasiun Kereta Api	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Pembangunan lajur, jalur/angkutan masal Koridor 5 (menghubungkan Demak (simpul)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	- Godong - Purwodadi (simpul)																									peraturan perundang-undangan	urusan pemerintahan bidang perhubungan)		
3.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN ENERGI																												
3.1	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)																												
	Peningkatan dan/ atau Pemantapan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tanjung Jati - Ungaran yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran - Krian yang melalui SWP I.B dan SWP 1.E; c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran - Ngimbang yang melalui SWP I.B dan E; dan d. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tanjung Jati - Pemalang yang melalui SWP I.C dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral) • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3.2	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)																												
	Peningkatan dan/ atau Pemantapan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kudus - Purwodadi yang melalui SWP I.C dan SWP I.D; b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Purwodadi - Kedungombo yang melalui SWP I.B dan SWP I.C; dan c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Semen Grobogan- Purwodadi yang melalui SWP I.C.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral) • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3.3	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																												
	Peningkatan dan/ atau Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral) • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3.4	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																												
	Peningkatan dan/ atau Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5								
																															peraturan perundang-undangan	urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral) • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3.5	Gardu Induk																															
	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan Gardu Induk	Gardu Induk berada di SWP I.C Blok I.C.1.																													• APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral) • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI																															
4.1	Jaringan Tetap																															
4.1.1	Jaringan Serat Optik																															
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi berupa Jaringan Serat Optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E																													• APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
	Pengembangan Saluran Bawah Tanah (<i>Duct</i>) di Jalan Kolektor untuk Jaringan Serat Optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E																													• APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
	Pengembangan Saluran Bawah Tanah (<i>Duct</i>) di Jalan Lokal untuk Jaringan Serat Optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E																													• APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V							
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044											
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													peraturan perundang-undangan	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
4.1.2	Rumah Kabel																													
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi berupa Rumah Kabel	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2																											<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
4.1.3	Telepon <i>Fixed Line</i>																													
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi berupa Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
	Pengembangan Saluran Bawah Tanah (<i>Duct</i>) di Jalan Kolektor untuk Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E																											<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
	Pengembangan Saluran Bawah Tanah (<i>Duct</i>) di Jalan Lokal untuk Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E																											<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA									
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V								
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044								
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
4.2	Jaringan Bergerak Seluler																											
4.2.1	Menara Base Transceiver Station (BTS)																											
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi berupa Menara Base Transceiver Station (BTS)	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan d. SWP 1.E di Blok I.E.1.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) • Swasta
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Menara Base Transceiver Station (BTS)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika) 	
5.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR																											
5.1	Sistem Jaringan Irigasi																											
1.5.1	Jaringan Irigasi Sekunder																											
	Peningkatan Jaringan Permukaan pada Jaringan Irigasi Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E.																								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5								
																																(Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Jaringan Irigasi Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																													<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada Jaringan Irigasi Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																													<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi untuk Jaringan Irigasi Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
1.5.1	Jaringan Irigasi Tersier																												
	Peningkatan Jaringan Permukaan pada Jaringan Irigasi Tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Jaringan Irigasi Tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																												<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada Jaringan Irigasi Tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Masyarakat Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi untuk Jaringan Irigasi Tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Masyarakat Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat
5.2	Sistem Pengendalian Banjir																												
5.2.1	Jaringan Pengendalian Banjir																												
	Pembangunan Kanal Banjir berupa Jaringan Pengendalian Banjir	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Peningkatan Kanal Banjir berupa Jaringan Pengendalian Banjir	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																												<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Kanal Banjir berupa Jaringan Pengendalian Banjir	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir berupa Jaringan Pengendalian Banjir	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
5.2.2	Bangunan Pengendalian Banjir																											
	Pembangunan Kanal Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir	1. SWP I.A Blok I.A.1; dan 2. SWP I.C Blok I.C.3.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																													<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Peningkatan Kanal Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir	1. SWP I.A Blok I.A.1; dan 2. SWP I.C Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Kanal Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir	1. SWP I.A Blok I.A.1; dan 2. SWP I.C Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir	1. SWP I.A Blok I.A.1; dan 2. SWP I.C Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA						
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V					
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
																														<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
5.3	Bangunan Sumber Daya Air																													
5.3.1	Prasarana Irigasi																													
	Rehabilitasi Bendung Irigasi berupa Prasarana Irigasi	a. Bendung Kuripan berada di SWP I.C di Blok I.C.1 b. Prasarana Irigasi lainnya berada di: 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan 2. SWP 1.E di Blok I.E.2.																											<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Peningkatan Bendung Irigasi berupa Prasarana Irigasi	a. Bendung Kuripan berada di SWP I.C di Blok I.C.1 b. Prasarana Irigasi lainnya berada di: 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan 2. SWP 1.E di Blok I.E.2.																											<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi berupa Prasarana Irigasi	a. Bendung Kuripan berada di SWP I.C di Blok I.C.1 b. Prasarana Irigasi lainnya berada di: 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan 2. SWP 1.E di Blok I.E.2.																											<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
6.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM																													
6.1	Unit Air Baku																													
6.1.1	Bangunan Pengambil Air Baku																													
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Bangunan Pengambil Air Baku	SWP I.C Blok I.C.3																											<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Bangunan Pengambil Air Baku	SWP I.C Blok I.C.3																											<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA								
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V							
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044							
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
6.1.2	Jaringan Transmisi Air Baku																										
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.A dan SWP I.C																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.A dan SWP I.C																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6.2	Unit Produksi																										
6.2.1	Instalasi Produksi																										
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Instalasi Produksi	SWP I.A Blok I.A.2																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Instalasi Produksi	SWP I.A Blok I.A.2																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6.2.1	Bangunan Penampung Air																										
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Bangunan Penampung Air	1. SWP I.A Blok I.A.2; 2. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; 3. SWP I.C Blok I.C.2; 4. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan 5. Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Bangunan Penampung Air	1. SWP I.A Blok I.A.2; 2. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; 3. SWP I.C Blok I.C.2; 4. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan 5. Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6.2.3	Jaringan Transmisi Air Minum																										
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Jaringan Transmisi Air Minum	Jaringan Transmisi Air Minum Perumdam Purwa Tirta Dharma yang melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																								• Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Jaringan Transmisi Air Minum	Jaringan Transmisi Air Minum Perumdam Purwa Tirta Dharma yang melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.																				<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional berupa Jaringan Transmisi Air Minum	Jaringan Transmisi Air Minum SPAM Dadimuria yang melalui SWP I.C.																				<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 		
6.3	Unit Distribusi																								
6.3.1	Jaringan Distribusi Pembagi																								
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 		
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 		
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024	2025-2029				2030-2034				2035-2039				2040-2044													
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
7.	PERWUJUDAN RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)																												
7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik																												
7.1.1	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik																												
	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP I.D Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> Swasta APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	
	Peningkatan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP I.D Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> Swasta APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	
7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat																												
7.2.1	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman																												
	Pembangunan/Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024	2025-2029				2030-2034				2035-2039				2040-2044													
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																													dan kawasan permukiman) <ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
	Peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
8.2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)																												
	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													bidang perumahan dan kawasan permukiman) <ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
	Peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
9.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN DRAINASE																												
9.1	Jaringan Drainase Primer																												
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													<ul style="list-style-type: none"> ruang) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024	2025-2029				2030-2034				2035-2039				2040-2044													
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5									
																							<ul style="list-style-type: none"> ruang) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 						
9.2	Jaringan Drainase Sekunder																												
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Swasta Masyarakat 						
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Swasta Masyarakat 						
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Swasta Masyarakat 						
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																				<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 						

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																										<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ruang) Swasta Masyarakat 		
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan: Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP 1.E.																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan umum dan penataan ruang) Swasta Masyarakat 		
10.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA																												
10.1	Jalur Evakuasi Bencana																												
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota pada Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Danyang – Krangganharjo yang melalui SWP I.B; b. Danyang – Pengkol yang melalui SWP I.B; c. Gending – Krangganharjo yang melalui SWP I.B; d. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A, dan SWP I.C; e. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; f. Brigjend. Sudiarto yang melalui SWP I.B dan SWP 1.E; g. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; h. Jalan Diponegoro yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; i. Jalan dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; j. Jalan Glugu yang melalui SWP I.A; k. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; l. Jalan Kap. Rusdiyot yang melalui SWP I.B; m. Jalan Lingkar Luar Simpang yang melalui SWP I.A; n. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; o. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; 																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan kebencanaan) 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
		g. Jalan Lingkar Luar Simpang yang melalui SWP I.A; h. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; i. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; j. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; k. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A; l. Jalan S. Parman yang melalui SWP.IA; m. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A; dan n. lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.																											
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelengkapan Jalan berupa Jaringan Pejalan Kaki	a. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A dan SWP I.C; b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A; c. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A; d. Jalan Diponegoro yang melalui SWP I.A dan SWP I.B; e. Jalan dr. Sutomo yang melalui SWP I.A; f. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A; g. Jalan Lingkar Luar Simpang yang melalui SWP I.A; h. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A; i. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A; j. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A; k. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A; l. Jalan S. Parman yang melalui SWP.IA; m. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A; dan n. lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
10.5	Tanggul Penahan Longsor																							<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang kebencanaan)
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai berupa Tanggul Penahan Longsor	SWP I.D.																						<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																											
1.	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG																											
1.1	Zona Badan Air																											
	Normalisasi/Restorasi Sungai di Zona Badan Air	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai pada Zona Badan Air	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Rehabilitasi Check Dam pada Zona Badan Air	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Zona Badan Air	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Rehabilitas Penguat Tebing pada Zona Badan Air	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	
1.2	Zona Perlindungan Setempat																												
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Zona Perlindungan Setempat	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Zona Perlindungan Setempat	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2,																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA							
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V												
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044												
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
		dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																													
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Zona Perlindungan Setempat	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																			<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) 									
1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau																														
	Komitmen Daerah dalam Pemenuhan RTH Publik untuk memenuhi 20% RTH Publik	Kawasan Perkotaan Purwodadi																			<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Swasta Masyarakat 									
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Kawasan Perkotaan Purwodadi																			<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam 									

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Umum Perumahan dalam Pemenuhan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)																											peraturan perundang-undangan	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pengelolaan 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat	
	Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Taman Vertikal (<i>Vertical Garden</i>)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									• APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat	• Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Penyediaan Taman Koridor (<i>Corridor Garden</i>)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									• APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat	• Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
	Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Taman Atap (<i>Roof Garden</i>)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat 		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Penyediaan Taman dalam Pot (<i>Planter Box Garden</i>)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat 		
	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun ketiga sebesar 3,26 %	Kawasan Perkotaan Purwodadi																								<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA									
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V								
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044								
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun keempat sebesar 3,26 %	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat
	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun kelima sebesar 3,26 %	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Swasta • Masyarakat
1.3.1	Sub-Zona Rimba Kota																											
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Rimba Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.2; dan b. SWP I.B di Blok I.B.1.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendukung Sub-Zona Rimba Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.2; dan b. SWP I.B di Blok I.B.1.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat
	Penetapan SK Rimba Kota pada Sub-Zona Rimba Kota	SWP I.B di Blok I.B.1.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
1.3.2	Sub-Zona Taman Kota																											<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Taman Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan d. SWP 1.E di Blok I.E.1.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendukung Sub-Zona Taman RW	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan c. SWP I.D di Blok I.D.3.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat
1.3.6	Sub-Zona Taman RT																												
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Taman RT	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; d. SWP I.D di Blok I.D.1; dan e. SWP I.E di Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendukung Sub-Zona Taman RT	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; d. SWP I.D di Blok I.D.1; dan e. SWP I.E di Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V							
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1.3.7	Sub-Zona Pemakaman																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Pemakaman	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendukung Sub-Zona Pemakaman	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat
1.3.8	Sub-Zona Jalur Hijau																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Jalur Hijau	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendukung Sub-Zona Jalur Hijau	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Masyarakat
2.	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA																												
2.1	Zona Badan Jalan																												
	Rehabilitasi Jalan pada Zona Badan Jalan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan pada Zona Badan Jalan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan																										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V										
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044										
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									undangan	ruang) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)	
2.2	Zona Pertanian																												
2.2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan																												
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B pada Sub-Zona Pertanian	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										• APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian)
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian)
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan																										• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah	• Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
		Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	bidang pertanian) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian)			
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pada Sub-Zona Tanaman Pangan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																							<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) 			
2.2.2	Sub-Zona Peternakan																												
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak pada Sub-Zona Peternakan	SWP I.D Blok I.D.3.																							<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) 			

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5			
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca panen Peternakan pada Sub-Zona Peternakan	SWP I.D Blok I.D.3.																									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian)
	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan pada Sub-Zona Peternakan	SWP I.D Blok I.D.3.																									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertanian)
2.3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																											
	Penataan Lingkungan pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP I.C Blok I.C.1																									<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.4	Zona Kawasan Peruntukan Industri																											
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.D Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) Swast

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN															SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA										
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV						PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039						2040-2044									
			1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5	1	2	3	4	5				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.D Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) Swasta 	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.D Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) Swasta 	
	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha di Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.D Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) Swasta 	
2.5	Zona Pariwisata																												
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Zona Pariwisata	a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata) Swasta
	Pengembangan Pariwisata pada Zona Pariwisata	a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata) Swasta
2.6	Zona Perumahan																												
2.6.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																												
	Penyelenggaraan Infrastruktur di Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; dan c. SWP I.C di Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029				2030-2034				2035-2039				2040-2044													
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																												<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; dan c. SWP I.C di Blok I.C.3.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat 	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh <10 Hektar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; dan c. SWP I.C di Blok I.C.3.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat 	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; dan c. SWP I.C di Blok I.C.3.																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat 	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang dalam Upaya Pemenuhan RTH Publik (RTH Publik 10% dari perumahan baru pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi)	Kawasan Perkotaan Purwodadi																									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) <ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat
2.5.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																												
	Penyelenggaraan Infrastruktur di Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh <10 Hektar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
2.7.2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Pemeliharaan Bangunan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Rehabilitasi Bangunan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat 		
	Penataan Lingkungan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) Swasta Masyarakat 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Rehabilitasi Bangunan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Penataan Lingkungan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
2.7.4	Sub-Zona SPU Skala RW																												
	Pemeliharaan Bangunan Sub-Zona SPU Skala RW	a. SWP I.B di Blok I.B.1; b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; c. SWP I.D di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan d. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat
	Rehabilitasi Bangunan Sub-Zona SPU Skala RW	a. SWP I.B di Blok I.B.1; b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; c. SWP I.D di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan d. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																												bidang perumahan dan kawasan permukiman) <ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 	
	Penataan Lingkungan pada Sub-Zona SPU Skala RW	a. SWP I.B di Blok I.B.1; e. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; f. SWP I.D di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan g. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
	Pengembangan Sub-Zona SPU Skala RW	a. SWP I.B di Blok I.B.1; b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; c. SWP I.D di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan d. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) • Swasta • Masyarakat 	
2.8	Zona Ruang Terbuka Non Hijau																												
	Penataan Lingkungan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau	a. SWP I.A di Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1.																									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan 	

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																												umum dan penataan ruang)
2.9	Zona Perdagangan dan Jasa																											
2.9.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota																											
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) • Swasta • Masyarakat
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA						
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V					
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
																														urusan pemerintahan bidang perdagangan) <ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
	Penataan kawasan pasar melalui renovasi bangunan, penataan parkir, dan pedagang kaki lima (PKL) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Pengaturan sirkulasi lalu lintas pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
2.9.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																													
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A di Blok I. A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.																											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) <ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A di Blok I. A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A di Blok I. A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Penataan kawasan pasar melalui renovasi bangunan, penataan parkir, dan pedagang kaki lima (PKL) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A di Blok I. A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V								
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044								
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																											urusan pemerintahan bidang perdagangan) <ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat
	Pengaturan sirkulasi lalu lintas pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A di Blok I. A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) Swasta Masyarakat
2.9.3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																										
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) Swasta Masyarakat
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) Swasta Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																													berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) <ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Penataan kawasan pasar melalui renovasi bangunan, penataan parkir, dan pedagang kaki lima (PKL) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Pengaturan sirkulasi lalu lintas pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V									
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044									
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																												urusan pemerintahan bidang perdagangan) • Swasta • Masyarakat
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.C Blok I.C.2.																									• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan)
	Pembangunan Gedung Terminal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.C Blok I.C.2.																									• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan)
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.C Blok I.C.2.																									• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.C Blok I.C.2.																									• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan) • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan)
2.10	Zona Perkantoran																											
	Pembangunan Bangunan Gedung pada Zona Perkantoran	SWP I.B di Blok I.B.1																									• APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V				
			2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039							2040-2044				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
																											<p>umum dan penataan ruang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) 		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Zona Perkantoran	<p>a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan e. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.</p>																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) 		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa pada Zona Perkantoran	<p>a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; d. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; e. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; f. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan g. SWP 1.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.</p>																								<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman) 		

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029				2030-2034				2035-2039				2040-2044													
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
2.11	Zona Peruntukan Lainnya																												
2.11.1	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)																												
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP I.A Blok I.A.2.																										<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2.11.2	Sub-Zona Pergudangan																												
	Peenataan Lingkungan pada Sub-Zona Pergudangan	a. SWP I.B di Blok I.B.2; dan b. SWP I.D di Blok I.D.1.																										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian)
	Pembangunan Sistem Resi Gudang pada Sub-Zona Pergudangan	SWP I.B di Blok I.B.2																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian)
	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang pada Sub-Zona Pergudangan	SWP I.B di Blok I.B.2																										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian) Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian)

NO.	PROGAM PRIORITAS	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN																									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V												
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2044												
1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
2.12 Zona Pengelolaan Persampahan																															
	Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan pada Zona Pengelolaan Persampahan	a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan b. SWP I.C di Blok I.C.3.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup)
	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung di Zona Pengelolaan Persampahan	a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan b. SWP I.C di Blok I.C.3.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten (Perangkat yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)
2.13 Zona Transportasi																															
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal pada Zona Transportasi	SWP I.C Blok I.C.1.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi (Perangkat yang berwenang dalam urusan perhubungan)
2.14 Zona Pertahanan dan Keamanan																															
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Serta Kualitas Infrastruktur Penunjang Zona Pertahanan dan Keamanan	a. SWP I.A di Blok I.A.1 berupa Kodim 0717 Purwodadi; dan b. SWP I.C di Blok I.C.3 berupa Koramil 01/Pwd.																												<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang pertahanan) • Pemerintah (Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang keamanan)

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI